**DAFTAR PUSTAKA**

1. **Buku**

Achmad, *konflik Agraria*, FSPI, Jakarta. 2007, hlm 9.

Andi Hamzah, *Asas-Asah Hukum Pidana*, Rhineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm 27.

-----------------, *Sistem Piana dan Pemidanaan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm 26.

Arie S. Hutagalung, *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah*, Cetakan I, Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, Jakarta, 2005, hlm 386.

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia , *Penyelesaian Konflik Pertanahan*, Direktorat Konflik Pertanahan , 2008, hlm 9.

Bambang Poernomo, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm 115.

Cansil C.T.S, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm 118.

---------------, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indoesia*, Cet ke-8, Balai Pustaka, Jakarta, hlm 346.

Course Book Fourth Edition, *West Group Publishing*, St. Paul Minn, 1999, hlm 211.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Indonesia*, Edisi II Cetakan IX, Balai Pustaka, Jakarta, 1997, hlm 360.

Djoko Prakoso da Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 20.

Hambali Thalib, *Sanksi Pemidanaan Dalam Konflik Pertahanan, Kebijakan Alternatif Penyelesaian Konflik Pertanahan di luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Edisi I Cetakan ke-2, Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2009, hlm 45.

Leden Marpung, *Asas-Asas Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 10.

Maria. SW Sumardjono, *Puspita Serangkaian Aneka Masalah Hukum Agraria*, Andi Offset. Yogyakarta, 1982, hlm 1.

Muchsin, *Ikhtiar Ilmu Hukum*, badan Penerbit Iblam, Jkarta, 2005, hlm 24.

Mudjiono, *Poliik dan Hukum Agraria,* Cet. Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1997, hlm 19.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumi, Bandung, 1984, hlm 149.

Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Harta Kekayaan, *Hak-Hak atas Tanah*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm159.

Moelyatno, *Membangun Hukum Pidana,* Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm 40.

Parlindungan A.P, Komentar atas Undang – Undang Pokok Agraria, Mandar Maju,Bandung, 1998, hlm 66.

Ralp H. Folsom, et. Al, *International Business Transactions A Problem Oriented*.

Rizal Akbar Maya Poetra, *Strategi dalam Penanganan Sengketa Pertanahan*, disampaikan dalam WorkShop Nasional, Strategi Penanganan dan Penyelesaian Sngketa Pertanahan Tahun 2007, diselenggarakan oleh BPN-RI di Sindhu Hotel Sanur Bali, Rabu 14 Nopember 2007.

Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1978, hlm 5.

Ronny Hanitija Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta, 1985,

hlm 10.

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 55.

Sianturi, *Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem, Jakarta, 1996, hlm 201.

Sihombing BF, *Evolusi Kebijakan Pertanahan dalam Hukum Tanah Indonesia*, Pt, Toko Gunung gung Tbk, Jakarta, hlm 79.

Simonangkir J.C.T, dkk, *Kamus Hukum, Sinar Grafika*, 2000, hlm 161.

Sudarto, *Pemidanaan Pidana dan Tindakan,* BPHN, Jakarta, 1982, hlm 72.

---------------, *Hukum Pidana*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1987/1988, hlm 9.

---------------, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hlm 30.

Sudharyo Soimin, *Status Hak dan Pembebasan Tanah*, Edisi ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm 24.

Supriadi, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 112.

Surojo Wingjodipuro, *Pengantar dan asas – Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 1982, hlm 197.

Teguh Prasetyo dan Addul Hakim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminalisasi*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2005, hlm 31-32,

Theodoros Tuanakotta, *Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*, Salemba empat, Jakarta, 2009, hlm 73.

Tresna R, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Pustaka Tinta Mas, 1994, hlm 28.

Winarmo Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Transito, Bandung, 1998, hlm 98.

Wirdjono Prodjodikoro, *Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, 1976, hlm 1.

Vos. H.B, *Leverboek Van Nederlands Strafrech*, Harlem, H.D. Tjeenk, Wilink, 1995, hlm 27.

1. **Peraturan Perundang – Undangan**

Kitab Undang – Undang Hukum Pidan, Pasal 406 ayat (1)

Undang – Undang Dasar 1945

Undang – Undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, No. 27/PUU-VIII/2007.

Peraturan Kepala BPN R.I No. 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan.

1. **Artikel/ Berita Lain**

Joyo Winoto, Sambutan Kepala Badan Pertahanan Republik Indonesia, Peringatan Hari Agraria Nasional dan Peringatan HUT UUPA ke-48, Menyelenggarakan Aset, Menyelamatkan Bangsa, Tanah, Negra dan Kemakmuran Rakyat, 2008, hlm 4.

Koalisi Anti Utang, 2007 dalam KAU Review

Koran Radar Garut Tanggal 21 Agustus 2012.

Sensus Pertanian BPS, 2003

Perspektif News, Jum’at,22 Februari 2013

[www.hukum.online](http://www.hukum.online). Diakses Tanggal 02 Juni 2013

[www.property.net](http://www.property.net). Diakses Tanggal 20 mei 2013